



RENJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUAPTEN SUMBAWA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum War.Wab

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 telah selesai disusun. RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

RENJA Perubahan Satpol PP Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Satpol PP Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 dan uraian mengenai tujuan, sasaran program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Di dalamnya memuat pula sasaran program/kegiatan, berupa indikator outcome/output kegiatan sebagai upaya terencana dan berorientasi pada hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Sumbawa ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan. Demikian, kiranya semoga bermanfaat. Atas kerjasama semua pihak dalam penyusunan Renja ini kami sampaikan terima kasih.

Sumbawa Besar, Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa,



ABDUL HARIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199303 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG1

B. LANDASAN HUKUM2

C. SISTEMATIKA PENULISAN4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU6

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD.....16

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH18

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL20

E. TELAAHAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN.....29

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PD

A. TELAAHAN RTRW DAN KLHS31

B. TELAAHAN TERHADAP KLHS.....32

C. TUJUAN DAN SASARAN PD34

D. PROGRAM DAN KEGIATAN.....34

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. RENCANA KERJA DAN PENDAAAN42

BAB V : PENUTUP.....48

DAFTAR TABEL

1. TABEL 2.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN RENJA PD 8

2. TABEL 2.2 CAPAIAN INSIKATOR UTAMA 17

3. TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL 22

4. TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 29

5. TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN 35

6. TABEL 4.1 PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN 22

7. TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL 22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2026 merupakan bentuk dari pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk priode tahunan dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian rencana pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) SKPD dalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang mememuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan jalan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai bentuk implementasi pelaksanaan rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Renstra pada Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai Perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan didaerah Kabupaten Sumbawa, khususnya dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibum melalui penegakan Perda dan Perbup penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditunjang dengan sistem pertahanan, keamanan, dengan kebijakan yang diarahkan kepada

peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa, maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Renja Satua Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman/ arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan Rencama Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Interen Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 200-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 461);
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025 adalah untuk :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Satpol PP untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
2. Menjamin keselarasan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tiap tahun anggaran;
3. Menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Menentukan capaian indikator sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai media informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
2. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025 ;
3. Agar tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi - misi Kepala Daerah terpilih.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang keterkaitan antara Renja dengan Renstra, dengan RPJMD, serta alasan-alasan yang mendasari terjadinya perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan setiap OPD serta pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

I .4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Memuat isu-isu yang dipandang strategis mengenai pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD. Memuat uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan usulan program

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Evaluasi pelaksanaan renja pada satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan kerja setiap OPD agar selaras dengan apa yang tercantum dalam Renstra yang telah disesuaikan dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2025, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa unsur seperti indikator program, target kinerja capaian program, dan realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan. Pada tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa telah melakukan redesain kegiatan berupa memunculkan kegiatan baru, menyederhanakan kegiatan maupun melakukan penajaman tolak ukur kegiatan (TUK), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, keluaran kegiatan Satpol PP Kabupaten Sumbawa pada tahun 2026 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Dalam mencapai sasaran - sasaran yang direncanakan, Satpol PP Kabupaten Sumbawa telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Pada tahun 2025 Satpol PP Kabupaten Sumbawa melaksanakan 2 (tiga) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.35.410.478.299 dan mencapai realisasi sebesar Rp.32.150.459.996 atau 90,79%. Kesenjangan antara target dan realisasi capaian keuangan tersebut disebabkan karena :

1. Kondisi tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran di beberapa belanja barang dan jasa sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pada sisi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

pada tahun 2025 dapat mencapai target yang ditentukan. Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 adalah “Capaian SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum ”. Dari target yang sudah ditetapkan yaitu 100%, sehingga realisasi 100% capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025 tercapai 100%. Indikator sasaran 2). “Peningkatan Kategori Nilai SAKIP SatpolPP” dari target kinerja BB terealisasi BB capaian indikator kinerja pada tahun 2024 adalah BB.

Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum memiliki 4 indikator program berupa 1) **Persentase Capaian Kinerja Penanganan Gangguan** dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100%. 2) **Capaian Kinerja Penegakan Perda dan Perkada** Perda target sebesar 100% dengan realisasi 100%, 3) **Persentase Peningkatan Anggota Satpolpp yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi**. memiliki target sebesar 100% terealisasi 100% pada tahun 2021 4). **Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas terlatih** target 100% terealisasi 21% Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh faktor - faktor pendukung antara lain:

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
2. Adanya produk - produk peraturan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
3. Terjalannya koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
4. Untuk lebih jelasnya, hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (s/d Tahun 2023)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tw 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1). Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	97%	100%	93%	20	100%	20%	20%
	(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gangguan Trantibum yang tertangani	138 Kasus	120 Kasus	134 Kasus	136 Kasus	20%	90 Kasus	20 Kasus	20 Kasus
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	138 Kasus	86 Kasus	86 Kasus	86 Kasus	100%	46	10	20%
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	48 Ksus	48 Kasus	48 Kasus	48 Kasus	100%	48 Kasus		20%
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tw 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn	22 Dokumn
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana prasarana Trantibum yang diadakan dan dipelihara	23 Unit	10 unit	0	0	0	14 Unit	11 Unit 20%
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	10 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan
			(2) Persentase Capaian Kinerja Penegakan Perdadadan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		(2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegakan Perda & Perkada yang ditangani	26 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	28 Kasus	30 Kasus 30 Kasus
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
	Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota								
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		(3)Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas terlatih	100%	16%	16%	16%	100%	16%	16%	100%
		Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	1.165 Orang	454 Orang	62 Orang	454 Orang	454 Orang	1.165 Orang	454 Orang	454 Orang
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		4)Persentase Peningkatan Anggota Satpolpp yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
		(3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
		Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Trantibum serta Linmas	1 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan Kategori Nilai AKIPSP	BB	B	B	B	0	0	0
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Peningkatan Nilai AKIPSP	77	77	77	77	77	77	77
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		PenyusunanDokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ihltisar Realiasasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Evaluasi kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
		Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	41 ASN	41 ASN	41 ASN	41 ASN	41 ASN	41 ASN	41 ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tw 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		disusun								
		Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yangdisusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Koordinasi dan pelaksanaanakuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dok ¹	1 Dok	1 Dok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2 Paket	5 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	2 Paket
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	15 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	10 Laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen	2 Doumen
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	1.031	1.022	1.025	1.025	1.025	1.028	500
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.028 Surat	1.028 Surat	1.028 Surat	1.028 Surat	1.028 Surat	1.028 Surat	1.028 Surat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	4 Unit

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Th 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Th 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tw 3 Th 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)*.
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	0	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 unit	9 unit
				Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan Direhab	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-

Informasi yang tersaji pada Tabel 2.1 menggambarkan bahwa belum terdapat kendala terhadap pencapaian kinerja SatpolPPP hingga pada perkiraan sampai tahun 2023. Sementara untuk target program dan kegiatan yang sama dengan rencana pada periode sebelumnya tetap akan diusulkan lagi tahun yang akan datang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua dari Undang-undang nomor 23 tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana, serta peraturan Menteri dalam negeri nomor 100 Tahun 2021 tentang penerapan Standar pelayanan minimal kemudian didukung secara sektoral dengan permendagri nomor 121 tahun 2021 tentang standar teknis pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tentu selalu dihadapkan dengan persoalan yang membutuhkan kemampuan SDM personil Pol PP yang profesional serta mampu menyelesaikan masalah tersebut guna tetap terjaga dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.

Mengingat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut diatas, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan yaitu Program pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa

No .	Tujuan PD	Sasaran PD		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-					Realisasi Capaian	Proyeksi	Analisis
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Penerapan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Dengan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		1	Indeks SPM Layanan Dasar Bidang Trantibumlinmas	16,95	16,97	20	20	20	20	20%	
		(1) Terpenuhinya Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum		Cakupan SPM Layanan Dasar Bidang Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	28,5%	28,7%	28,9%	29,1%	29,3%	28,5%	28,7%	
		(2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD		Peningkatan Kategori Nilai SAKIP PD	BB	BB	BB	BB	A		BB	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan berhasil menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan daerah dalam hal menjaga ketentraman, ketertiban umum, penegakan perda dan perkara serta perlindungan masyarakat yang dikategorikan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis adalah isu yang berkaitan dengan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya baik internal maupun eksternal dimana isu - isu tersebut banyak mempengaruhi organisasi yang bersangkutan. Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa antara lain :

1. Kuantitas personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa masih kurang.
2. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, salah satunya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Sumbawa yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS, pengadaan barang / jasa dan informasi teknologi.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ketugasan.

Melihat kompleksitas permasalahan yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa maka digunakan pendekatan analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Faktor - faktor penentu keberhasilan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal terdiri dari faktor kekuatan dan kelemahan

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam

kurun waktu 4 tahun ke depan, yakni:

- 1) Adanya SOP dan mekanisme kerja yang baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
- 2) Penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dari jalur non PNS.
- 3) Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang – undangan.
- 4) Dukungan terhadap PPNS.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, antara lain :

- 1) Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang bersertifikasi / memiliki keahlian khusus seperti Intelegen, PPNS, Pengadaan Barang / Jasa maupun teknologi informasi.
- 2) Terbatasnya dukungan anggaran.
- 3) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai.
- 4) Sanksi pidana 6 bulan dalam Perda yang membuat proses penegakan Perda lebih rumit dan membutuhkan waktu lama karena harus melalui pemberkasian singkat.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Dukungan dari Pemerintah Daerah yang concern terhadap peningkatan fungsi dan kapasitas SDM Satpol PP Kabupaten Sumbawa.
- 2) Koordinasi dan kerjasama lintas OPD yang terjalin dengan baik.
- 3) Wilayah Kabupaten Sumbawa yang relatif kondusif, aman dan nyaman;
- 4) Budaya “Lenge Rasa” dalam masyarakat yang masih terpelihara dengan baik;

b. Ancaman (Threats)

- 1) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, sehingga semakin mudah mengakses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum
- 3) Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/ suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kabupaten Sumbawa menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisa di atas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yakni :

1. Peningkatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (gelandangan, pengemis dan anak jalanan, penambangan liar, minuman beralkohol, kejahatan jalanan / klithih, reklame, dll).
2. Pengendalian gejolak sosial masyarakat.
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Peningkatan peran aktif Satlinmas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas untuk melakukan pengamanan Pemilu serentak 2024.
6. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan Fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen

kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

RENJA Perubahan tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa 2021-2026, dan merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas Adapun pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN ANALISA
	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1)Persentase gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	100%	267.040.908	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	100%	267.040.908	
	(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	140 Kasus	4,356,989,908	(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan Gangguan Trantibum	140 Kasus	4,356,989,908	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	98 Kasus	58,323,513	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	98 Kasus	58,323,513	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	42 Kasus	43,088,403	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	42 Kasus	43,088,403	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	49,078,992	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	49,078,992	
	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah SOP penegakan Perda dan perkada serta gangguan Trantibum yang disusun	1 Dokumen	4,169,949,000	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah SOP penegakan Perda dan perkada serta gangguan Trantibum yang disusun	14	4,169,949,000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman	22 Unit	11,550,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan	22 Unit	11,550,000	

Kode				RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN ANALISA
				Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum yang Tersedia			Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum yang Tersedia			
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda dan Perkada (SPM)	1 Laporan	25,000,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda dan Perkada (SPM)	1 Laporan	25,000,000	
					2). Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yg ditangani	100%	536,686,215		2). Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yg ditangani	100%	536,686,215	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	100%	714.688.922	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	100%	714.688.922	
				(2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegakan Perda & Perkada yang ditangani	24 Kasus	536.686.215	(2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegakan Perda & Perkada yang ditangani	24 Kasus	536.686.215	
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masya/Kelompok Masyarakat/Pelaku	4 Laporan	48.791.254	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati	4 Laporan	48.791.254	
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	452,837,631	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	4 Laporan	452,837,631	
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	35,057,330	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	35,057,330	
					(3).Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	100	644,167,960		(3).Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	100	644,167,960	

Kode				RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN ANALISA
				Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	11
				1). Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	1.650 Orang	644,167,960	1). Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	1.650 Orang	644,167,960	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	1 Dokumen	64.042.960	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	1 Dokumen	64.042.960	
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	46.935.369	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	46.935.369	
					4)Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	100	225,000,000		4)Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	100	225,000,000	
				(1)Penanganan Ganggu Ketenteraman dan Ketertib Umum dalam 1 (Satu) Daer Kabupaten/Kota	jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	7 Orang	225,000,000	(1)Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	7 Orang	225,000,000	
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak AsasiManusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	125,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	125,000,000	
				(3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 Orang	100.000.000	(3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 Orang	100.000.000	
					Jumlah Satpol PP yang mendapatkan Diklat Teknis PPNS	2 Orang	52.500.000	Jumlah Satpol PP yang mendapatkan Diklat Teknis PPNS	Jumlah Satpol PP yang mendapatkan Diklat Teknis PPNS	2 Orang	52.500.000	

Kode				RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN ANALISA
				Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPD	Peningkatan Kategori Nilai AKIP ^{SatpolPP}	BB	13,115,917,343	Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPD	Peningkatan Kategori Predikat hasil evaluasi AKIP SatpolPP	BB	13,115,917,343	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Peningkatan Nilai AKIP ^{SatpolPP}	79	10.247.387.343	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan an Kategori Nilai SAKIP PD	79	10.247.387.343	
				Perencanaan, Pengagangaaran dan Evaluasi Perangkat Daeah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengagangaaran dan Evaluasi Perangkat Daeah	8 Dokumen	37,016,893	Perencanaan, Pengagangaaran dan Evaluasi Perangkat Daeah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengagangaaran dan Evaluasi Perangkat Daeah	8 Dokumen	37,016,893	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,731,616	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,731,616	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	5,021,727	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	5,021,727	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	3,926,519	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,926,519	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA- SKPD	1 Dokumen	2,410,272	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DKA- SKPD	1 Dokumen	2,410,272	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA- SKPD	1 Dokumen	3,149,446	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DKA-SKPD	1 Dokumen	3,149,446	

Kode				RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN ANALISA
				Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ihltisar Realiasasi Kinerja	1 Dokumen	15,637,738	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ihltisar Realiasasi Kinerja	1 Dokumen	15,637,738	
				Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	1 Dokumen	3,139,575	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	1 Dokumen	3,139,575	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun ASN	8 Dokumen	7,651,532,215	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun ASN	8 Dokumen	7,651,532,215	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	41 ASN	4,630,310,487	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	41 ASN	4,630,310,487	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun	1 Dokumen	3,009,688,757	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun	1 Dokumen	3,009,688,757	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	1,814,093	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	1,814,093	
				Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,801,331	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,801,331	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	3,632,239	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	3,632,239	
				Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	413,820	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	413,820	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2,590,852	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 Dokumen	2,590,852	

Kode				RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN ANALISA
				Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulan/ SemesteranSKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,280,637	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,280,637	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1,659,746	Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BarangMilik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1,659,746	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,659,746	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahSKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,659,746	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	4 Buah	272,044,937	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	4 Buah	272,044,937	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 jenis	29,791,639	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 jenis	29,791,639	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	4 HarianSurat Kabar	2,421,210	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang- Undangan	4 HarianSurat Kabar	2,421,210	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 paket	7,012,509	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 paket	7,012,509	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	232,819,579	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	232,819,579	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan	1 unit	400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan	1 unit	400.000.000	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangdiadakan	1 unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangdiadakan	1 unit	400.000.000	

Kode				RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				CATATAN ANALISA
				Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	11
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Buah	41,373,847	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Buah	41,373,847	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	1.031	8,353,976	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	1.031	8,353,976	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	14,869,872	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	14,869,872	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	18,150,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	18,150,000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	5,264,688,952	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	5,264,688,952	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	141,237,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	141,237,250	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	123,451,702	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	123,451,702	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan Direhab	1 Unit	5,000,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan Direhab	1 Unit	5,000,000,000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja memperhatikan dan menelaah usulan, masukan maupun rekomendasi program/kegiatan dari semua pihak terkait, baik Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota, DPRD Kabupaten Sumbawa, akademisi dan stakeholder. Daftar usulan/masukan maupun rekomendasi tersebut disinkronisasikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, skala prioritas, kondisi lapangan serta mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan pendanaan yang selanjutnya menjadi bahan masukan atau acuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa menentukan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTETAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.05.02.10.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
1.05.02.10.1.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	“Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” sebanyak 1 Laporan usulan Bidang Ketenteraman danKetertiban Umum

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2020-2024, diketahui bahwa sasaran strategis Kemendagri ditentukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis. Adapun tujuan strategis yang berhubungan dengan kinerja Satpol PP yaitu :**“Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa” (T1).**Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut telah dirumuskan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan kinerja Satpol PP yaitu: **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4)”**, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis ini, meliputi:

- 1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan kategori “BAIK”.
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Memperhatikan sasaran Kementerian Dalam Negeri diatas, maka secara umum memiliki korelasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu sasaran yang telah ditentukan diatas menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

Telaahan terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Berdasarkan dokumen Perubahan Rancangan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2013-2027, diketahui bahwa sasaran ditentukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran produk hukum daerah

Memperhatikan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Namun sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka terdapat perbedaan strata kewenangan antara sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB dengan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Pemerintah kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan pada bidang Trantibumlinmas di wilayah Kabupaten/Kota, sementara itu, pemerintah provinsi melaksanakan kewenangan pada bidang Trantibumlinmas di seluruh wilayah Provinsi NTB. Adapun persamaannya adalah pada bidang Trantibumlinmas, dimana antara provinsi dan kabupaten/kota sama-sama berwenang menyelenggarakan kegiatan peningkatan Trantibumlinmas. Maka sasaran yang telah ditentukan diatas sebagian menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, khususnya yang terkait dengan bidang Trantibumlinmas.

3.2 Telaahan RTRW dan KLHS Telaahan terhadap RTRW

Pada ketentuan pasal 3 Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031, disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah kabupaten Sumbawa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi investasi, produktif, aman, nyaman, dan bersinergi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

Di dalam Bab IX tentang Ketentuan Penyidikan, Pasal 77 :

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Telaahan terhadap KLHS

Pentingnya kajian lingkungan hidup bagi Satpol PP untuk memberikan dukungan yang tepat terhadap upaya-upaya mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian dan sinergitas semua pihak mengingat dampak

lingkungan hidup yang begitu besar bagi keberlanjutan ekosistem. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP harus mampu bersinergi untuk Melakukan penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Sumbawa 4 (empat) tahunan. Penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Sumbawa ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, serta menyesuaikan Renstra Kementrian Dalam Negeri RI Tahun 2020 - 2024 khususnya Direktorat Pol PP dan Linmas berdasarkan isu - isu strategis di bidang keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Dalam RPJMN 2020 - 2024 disebutkan bahwa visi RPJMN 2020 - 2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”, dengan tema yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaannya difokuskan pada kebijakan - kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Berikut ini adalah 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Satpol PP Kabupaten Sumbawa yaitu : “Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Kabupaten Sumbawa”.

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut, sesuai dengan aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sasaran yang akan diwujudkan adalah :

- 1) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.
- 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.5 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa telah menetapkan 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program-program Untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tujuan dan sasarannya, maka anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.14,486,688,402,00. Terkait program dan pendanaannya dijelaskan secara lebih rinci melalui tabel berikut ini :

**Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Sumbawa**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	SatpolPP	100%	267.040.908	100%	267.040.908
	(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	SatpolPP	138 Kasus	4,356,989,908	138 Kasus	4,356,989,908
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	94 Kasus	58,323,513	94 Kasus	58,323,513
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	SatpolPP	44 Kasus	43,088,403	44 Kasus	43,088,403
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	7 Dokumen	49,078,992	7 Dokumen	49,078,992
	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah SOP penegakan Perda dan perkada serta gangguan Trantibum yang disusun	SatpolPP	1 Dokumen	4,169,949,000	14	4,169,949,000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	SatpolPP	22 Unit	11,550,000	22 Unit	11,550,000
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda dan Perkada (SPM)	SatpolPP	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000
		2). Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yg ditangani	SatpolPP	100%	536,686,215	100%	536,686,215

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	SatpolPP	26	714.688.922	26	714.688.922
	(2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegakan Perda & Perkada yang ditangani	SatpolPP	26 Kasus	536.686.215	26 Kasus	536.686.215
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masya/Kelompok Masyarakat/Pelaku	SatpolPP	4 Laporan	48.791.254	4 Laporan	48.791.254
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	SatpolPP	4 Laporan	452,837,631	4 Laporan	452,837,631
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	SatpolPP	4 Laporan	35,057,330	4 Laporan	35,057,330
		(3).Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	SatpolPP	100	644,167,960	100	644,167,960
	1). Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	SatpolPP	1.650 Orang	644,167,960	1.650 Orang	644,167,960
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	SatpolPP	1 Dokumen	64.042.960	1 Dokumen	64.042.960
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatpolPP	1 Dokumen	46.935.369	1 Dokumen	46.935.369

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		4) Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	SatpolPP	100	225,000,000	100	225,000,000
	(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	SatpolPP	7 Orang	225,000,000	7 Orang	225,000,000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	SatpolPP	200 Orang	125,000,000	200 Orang	125,000,000
	(3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	SatpolPP	5 Orang	100.000.000	5 Orang	100.000.000
		Jumlah Satpol PP yang mendapatkan Diklat Teknis PPNS	SatpolPP	2 Orang	52.500.000	2 Orang	52.500.000
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan Kategori Nilai AKIP SatpolPP	SatpolPP	BB	13,115,917,343	BB	13,115,917,343
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Peningkatan Nilai AKIP SatpolPP	SatpolPP	79	10.247.387.343	79	10.247.387.343
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SatpolPP	8 Dokumen	33.651.720	8 Dokumen	33.651.720
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	3.392.378	1 Dokumen	3.392.378
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	4.565.207	1 Dokumen	4.565.207
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA- SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	3.569.563	1 Dokumen	3.569.563
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA- SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	2.191.156	1 Dokumen	2.191.156

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	SatpolPP	1 Dokumen	2.863.133	1 Dokumen	2.863.133
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	SatpolPP	1 Dokumen	14.216.125	1 Dokumen	14.216.125
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SatpolPP	1 Dokumen	2.854.159	1 Dokumen	2.854.159
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun ASN	SatpolPP	8 Dokumen	7.286.674.276	8 Dokumen	7.286.674.276
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	SatpolPP	41 ASN	4.409.819.511	41 ASN	4.409.819.511
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun	SatpolPP	1 Dokumen	2.866.370.245	1 Dokumen	2.866.370.245
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang disusun	SatpolPP	1 Dokumen	1.649.175	1 Dokumen	1.649.175
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	1.637.573	1 Dokumen	1.637.573
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	SatpolPP	1 Dokumen	3.302.035	1 Dokumen	3.302.035
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	SatpolPP	1 Dokumen	376.200	1 Dokumen	376.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	2.355.320	1 Dokumen	2.355.320
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SatpolPP	1 Dokumen	1.164.216	1 Dokumen	1.164.216

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	SatpolPP	1 Dokumen	1.508.860	1 Dokumen	1.508.860
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	SatpolPP	1 Dokumen	1.508.860	1 Dokumen	1.508.860
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	SatpolPP	4 Buah	247.313.579	4 Buah	247.313.579
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	SatpolPP	11 jenis	27.083.308	11 jenis	27.083.308
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	SatpolPP	4 Harian Surat Kabar	2.201.100	4 Harian Surat Kabar	2.201.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SatpolPP	2 paket	6.375.008	2 paket	6.375.008
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SatpolPP	24 Laporan	211.654.163	24 laporan	211.654.163
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan	SatpolPP	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	SatpolPP	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	3 Buah	37.612.588	3 Buah	37.612.588
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	SatpolPP	1.031	7.594.523	1.031	7.594.523
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	SatpolPP	2 Laporan	13.518.065	2 Laporan	13.518.065
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SatpolPP	2 Laporan	16.500.000	2 Laporan	16.500.000

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SatpolPP	15 Unit	2.240.626.320	15 Unit	2.240.626.320
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SatpolPP	8 Unit	128.397.500	8 Unit	128.397.500
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	SatpolPP	6 unit	112.228.820	6 unit	112.228.820
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan Direhab	SatpolPP	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;
2. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam program - program, maka ditetapkan kegiatan - kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang telah diselaraskan dengan nama program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan - kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Jasa Pemeliharaan
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 3) Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
 - 4) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b. Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda/perkada
 - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Rincian perencanaan program dan kegiatan - kegiatan serta pendanaan yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Satpol PP
Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Rencana Tahun 2024
				Pagu Indikatif
	2	3	4	5
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum Yang dapat diselesaikan	100%	267.040.908
	(1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	138 Kasus	4,356,989,908
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pencegahan Gangguan	94 Kasus	58,323,513

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Rencana Tahun 2024
				Pagu Indikatif
	2	3	4	5
		Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	44 Kasus	43,088,403
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	49,078,992
	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah SOP penegakan Perda dan perkada serta gangguan Trantibum yang disusun	1 Dokumen	4,169,949,000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	22 Unit	11,550,000
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda dan Perkada (SPM)	1 Laporan	25,000,000
		2). Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yg ditangani	100%	536,686,215
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani	100%	714.688.922
	(2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah penegakan Perda & Perkada yang ditangani	26 Kasus	536.686.215
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masya/Kelompok Masyarakat/Pelaku	4 Laporan	48.791.254
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	452,837,631
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	35,057,330
		(3).Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	100	644,167,960
	1). Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	1.650 Orang	644,167,960

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Rencana Tahun 2024
				Pagu Indikatif
	2	3	4	5
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	1 Dokumen	64.042.960
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	46.935.369
		4)Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	100	225,000,000
	(1)Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	7 Orang	225,000,000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	125,000,000
	(3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 Orang	100.000.000
		Jumlah Satpol PP yang mendapatkan Diklat Teknis PPNS	2 Orang	52.500.000
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan Kategori Nilai AKIP SatpolPP	BB	13.115.917.343
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Peningkatan Nilai AKIP SatpolPP	79	13.115.917.343
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 dokumen	33.651.720
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	3.392.378
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	33.651.720
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	4.565.207
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	1 Dok	3.569.563
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	2.191.156

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Rencana Tahun 2024
				Pagu Indikatif
	2	3	4	5
		Dokumen Perubahan DKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ihltisar Realiasasi Kinerja	1 Laporan	2.863.133
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang	4 Laporan	14.216.125
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun ASN	8 Dokumen	7.286.674.276
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan	41 ASN	4.409.819.511
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun	1 Dok	2.866.370.245
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD yangdisusun	1 Dok	1.649.175
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1.637.573
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Laporan	3.302.035
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan TanggapanPemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	376.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2.355.320
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1.164.216
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokomen	1.508.860
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahSKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokomen	1.508.860
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan	4 Dokumen	247.313.579
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	11 jenis	27.083.308
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Harian Surat Kabar	2.201.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 paket	6.375.008

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Rencana Tahun 2024
				Pagu Indikatif
	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	211.654.163
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	37.612.588
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	1.031	7.594.523
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Rek	13.518.065
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	16.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	2.240.626.320
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	128.397.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	112.228.820
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara dan Direhab	1 Unit	2.000.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas serta usulan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa 2025 juga telah ditetapkan target - target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tugas 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja ini didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026 serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini dapat dijadikan prioritas dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan terselenggaranya penegakan Perda/Perkada serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, Juli 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa,



ABDUL HARIS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199303 1 023